

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis pada bab sebelumnya dan pengalaman penulis melaksanakan magang di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Organisasi/Fungsi yang terlibat pada belanja modal di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa pejabat dan individu terkait, diantaranya: KPA/KPB, PPK, Penjabat Pengadaan, SPM, dan Bendehara.
2. Di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa dokumen yang biasanya digunakan pada belanja modal, diantaranya: RKBMN, RKA, RUP, dokumen-dokumen pengadaan, SPMK, BAST, BAP, SPP, SPM, SP2D, dan lainnya.
3. Belanja Modal pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat membuat catatan akuntansi berupa beberapa jenis jurnal dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
4. Prosedur Belanja Modal pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat umumnya mengikuti pedoman dan regulasi yang mana sesuai dengan ketentuan di BPKP Pusat, namun dapat disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis buat, adapun saran dari penulis sebagai berikut: Belanja modal pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tetap mempertahankan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam belanja modal agar terwujudnya pengeluaran anggaran yang efisien dan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah/instansi terkait.

